



PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2025

KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN
2025

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
OPD KECAMATAN KEDUNGPRING
TAHUN 2025**



**KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2025 Kecamatan Kedungpring ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja OPD di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta arahan dari semua pihak mudah-mudahan bermanfaat guna mewujudkan harapan masyarakat dan Pemerintah.

Kedungpring, 17 Juni 2025

CAMAT KEDUNGPRING



NOMAN KRESNA MARTHA SENA.S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19840301 200212 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, Proses Penyusunan perubahan Rencana OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu:



1. Pendekatan politik yaitu rencana pembangunan berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam renacana pembangunan jangka menengah.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah diatasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,

Top-Down dan Bottom-Up diselaraskan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2). Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3). Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 4). Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 7). Undang-undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 8). Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9). Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun



2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
- 12). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 13). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 14). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010–2014;
- 16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);



- 18). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
- 19). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 471);
- 20). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E);
- 21). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 03 / E);
- 22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata-cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
- 23). Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2022;
- 24). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 - 2031;
- 25). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
- 26). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
- 27). Surat Edaran (SE) Bupati Lamongan, Nomor: 050/129/413.204/2024 Tanggal 02 Februari 2024 Perihal



Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan.

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip **GOOD GOVERNANCE**.

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis, program-program pembangunan selama tahun 2025 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2025.

1.4 Sistimatika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring

Bab I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Dasar Pertimbangan Perubahan
1.4	Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Kedungpring

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu



- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Kedungpring
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Kecamatan Kedungpring 2025
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Bab IV Penutup

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

OPD Kecamatan Kedungpring telah mengevaluasi Kinerja tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD sampai dengan tahun berjalan sebagaimana berikut:

- 1. Realisasi program yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi Program Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah:



TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan I Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

No	Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2025 (s/d Trb 1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		PD Penanggu ng Jawab	Ket					
												9=8/7X100%			11= 10/5x100%								
	1	2										3	4		5				6		7		8
	7.01	56	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM	87,07	2.318.904.900,00	87,12	1.963.805.866,00	84,65	2.146.528.545,00	0	458.278.616,00	0,00%	21,35%	87,12	2.422.084.482,00	100,06%	104,45%		
	7.01	56	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	9 Dok	69.960.500,00	9 Dok	67.662.800,00	9 Dok	74.614.400,00	2 Dok	5.516.400,00	22,22%	7,39%	11,00	73.179.200,00	122,22%	104,60%		
	7.01	56	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras	5 Dok	13.786.000,00	5 Dok	13.654.400,00	5 Dok	14.206.400,00	1 Dok	1.894.800,00	20,00%	13,34%	6	15.549.200,00	120,00%	112,79%		
	7.01	56	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dok	17.615.000,00	4 Dok	16.669.900,00	4 Dok	17.959.000,00	1 Dok	3.621.600,00	25,00%	20,17%	5	20.291.500,00	125,00%	115,19%		
	7.01	56	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	1 Lap	38.559.500,00	1 Lap	37.338.500,00	1 Lap	42.449.000,00	0	-	0,00%	0,00%	1	37.338.500,00	100,00%	96,83%		



							Daerah																	
	7.01	56	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	12 Lap	1.862.093.050,00	12 Lap	1.570.753.218,00	12 Lap	1.748.729.893,00	1 Lap	393.281.473,00	8,33%	22,49%	13,00	1.964.034.691,00	108,33%	105,47%		
	7.01	56	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Peg	1.847.326.550,00	20 Peg	1.557.288.718,00	20 Peg	1.732.971.093,00	20 Peg	392.602.673,00	10,00%	22,65%	40	1.949.891.391,00	200,00%	105,55%		
	7.01	56	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 Lap	7.452.000,00	2 Lap	7.229.500,00	2 Lap	8.129.400,00	0	377.000,00	0,00%	4,64%	2	7.606.500,00	100,00%	102,07%		
	7.01	56	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan LKPI, LKJIP, LPPD dan RENJA SKPD	4 Dok	7.314.500,00	4 Dok	6.235.000,00	4 Dok	7.629.400,00	1 Dok	301.800,00	25,00%	3,96%	5	6.536.800,00	125,00%	89,37%		
	7.01	56	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian dengan baik	100%	6.900.000,00	100%	6.050.000,00	100%	-	-	-	-	-	-	6.050.000,00	-	87,68%		
	7.01	56	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25 Stel	6.900.000,00	50 Stel	6.050.000,00	50 Stel	-	-	-	-	-	-	6.050.000,00	-	87,68%		
	7.01	56	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja tugas umum pemerintah	100%	43.364.600,00	100%	33.800.800,00	100%	51.330.400,00	25%	4.861.200,00	25,00%	9,47%	1,25	38.662.000,00	125,00%	89,16%		
	7.01	56	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor	8 Jenis	8.233.600,00	8 Jenis	3.655.500,00	8 Jenis	5.026.000,00	2 Jenis	-	25,00%	0,00%	10	3.655.500,00	125,00%	44,40%		



7.01	56	01	20	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	11.260.000,00	10 Jenis	8.038.000,00	10 Jenis	11.304.000,00	2 Jenis	1.980.800,00	20,00 %	17,52%	12	10.018.800,00	120,00 %	88,98%		
7.01	56	01	20	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	25 Item	14.055.000,00	25 Item	13.451.300,00	25 Item	18.805.400,00	5 Item	2.080.400,00	20,00 %	11,06%	30	15.531.700,00	120,00 %	110,51 %		
7.01	56	01	20	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dok	5.556.000,00	12 Dok	4.400.000,00	12 Dok	5.556.000,00	3 Dok	800.000,00	25,00 %	14,40%	15	5.200.000,00	125,00 %	93,59%		
7.01	56	01	20	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan untuk makanan dan minuman rapat	4 Keg	4.260.000,00	4 Keg	4.256.000,00	4 Keg	10.639.000,00	1 Keg	-	25,00 %	0,00%	5	4.256.000,00	125,00 %	99,91%		
7.01	56	01	20	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan	100%	15.234.000,00	100%	14.800.000,00	100%	20.862.800,00	0,00	-	0,00 %	0,00%	1,00	14.800.000,00	100,00 %	97,15%		
7.01	56	01	20	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	6 Item	15.234.000,00	6 Item	14.800.000,00	6 Item	20.862.800,00	0	-	0,00 %	0,00%	6	14.800.000,00	100,00 %	97,15%		
7.01	56	01	20	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	245.287.000,00	100%	204.215.248,00	100%	167.469.452,00	0,25	51.469.543,00	25,00 %	30,73%	1,25	255.684.791,00	125,00 %	104,24 %		
7.01	56	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Rek	44.875.000,00	3 Rek	33.650.952,00	3 Rek	45.797.452,00	3 Rek	7.209.168,00	10,00 %	15,74%	6	40.860.120,00	50,00 %	91,05%		
7.01	56	01	20	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	9 Org	200.412.000,00	9 Org	170.564.296,00	9 Org	121.672.000,00	9 Org	44.260.375,00	10,00 %	36,38%	18	214.824.671,00	200,00 %	107,19 %		



7.01	56	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	76.065.750,00	100%	66.523.800,00	100%	83.521.600,00	25%	3.150.000,00	25,00%	3,77%	1,25	69.673.800,00	125,00%	91,60%		
7.01	56	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan surat yang terbayarkan	10 Unit R4 & Unit R2	16.948.250,00	10 Unit R4 & Unit R2	8.270.000,00	10 Unit R4 & Unit R2	23.812.000,00	10 Unit R4 & Unit R2	2.200.000,00	10,00%	9,24%	20	10.470.000,00	200,00%	61,78%		
7.01	56	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Item	10.000.000,00	6 Item	8.520.000,00	6 Item	13.520.000,00	1 Item	950.000,00	16,67%	7,03%	7	9.470.000,00	116,67%	94,70%		
7.01	56	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan	1 Paket	49.117.500,00	1 Paket	49.733.800,00	1 Paket	46.189.600,00	0	-	0,00%	0,00%	1	49.733.800,00	100,00%	101,25%		
7.01	56	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	100%	8.148.000,00	100%	8.101.500,00	100%	10.783.500,00	25%	-	25,00%	0,00%	1,25	8.101.500,00	125,00%	99,43%		
7.01	56	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	100%	8.148.000,00	100%	8.101.500,00	100%	10.783.500,00	25%	-	25,00%	0,00%	1,25	8.101.500,00	125,00%	99,43%		



7.01	56	02	203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	8.148.000,00	100%	8.101.500,00	100%	10.783.500,00	25%	-	25,00%	0,00%	1,25	8.101.500,00	125,00%	99,43%		
7.01	56	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	44.458.000,00	100%	39.135.200,00	100%	34.373.500,00	25%	1.973.800,00	25,00%	5,74%	1,25	41.109.000,00	125,00%	92,47%		
7.01	56	03	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	23 Desa	30.958.000,00	23 Desa	25.812.000,00	23 Desa	13.718.300,00	23 Desa	1.973.800,00	100,00%	14,39%	23	27.785.800,00	100,00%	89,75%		
7.01	56	03	201	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasy.	22.339.000,00	23 Lembaga Kemasy.	20.934.500,00	23 Lembaga Kemasy.	3.338.800,00	23 Lembaga Kemasy.	1.973.800,00	100,00%	59,12%	23	22.908.300,00	100,00%	102,55%		
7.01	56	03	201	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Lap	8.619.000,00	23 Lap	4.877.500,00	23 Lap	10.379.500,00	23	-	100,00%	0,00%	23	4.877.500,00	100,00%	56,59%		
7.01	56	03	206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	23 Desa	13.500.000,00	23 Desa	13.323.200,00	23 Desa	20.655.200,00	23 Desa	-	100,00%	0,00%	23	13.323.200,00	100,00%	98,69%		



7.01	56	03	206	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	23 Keluarga	13.500.000,00	23 Keluarga	13.323.200,00	23 Keluarga	20.655.200,00	23 Keluarga	-	10,00%	0,00%	23	13.323.200,00	100,00%	98,69%		
7.01	56	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	1,00	10.678.000,00	1,00	10.678.000,00	1,00	15.802.800,00	25%	-	25,00%	0,00%	1,25	10.678.000,00	125,00%	100,00%		
7.01	56	04	703	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang dibina keamanan dan ketertiban umum	23 Desa	10.678.000,00	23 Desa	10.678.000,00	23 Desa	15.802.800,00	23 Desa	-	10,00%	0,00%	23	10.678.000,00	100,00%	100,00%		
7.01	56	04	703	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Lap	10.678.000,00	23 Lap	10.678.000,00	23 Lap	15.802.800,00	23 Lap	-	10,00%	0,00%	23	10.678.000,00	100,00%	100,00%		
7.01	56	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	10.764.000,00	100%	9.978.000,00	100%	22.978.800,00	25%	3.752.600,00	25,00%	16,33%	1,25	13.730.600,00	125,00%	127,56%		
7.01	56	05	7	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi urusan Pemerintahan umum	100%	10.764.000,00	100%	9.978.000,00	100%	22.978.800,00	25%	3.752.600,00	25,00%	16,33%	1,25	13.730.600,00	125,00%	127,56%		
7.01	56	05	703	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23 Org	10.764.000,00	23 Org	9.978.000,00	23 Org	22.978.800,00	23 Org	3.752.600,00	10,00%	16,33%	23	13.730.600,00	100,00%	127,56%		
7.01	56	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	Persentase Desa Naik Kelas	13,04%	75.461.000,00	13,04%	109.513.500,00	13,04%	76.772.400,00	0,00	-	0,00%	0,00%	0,4348	109.513.500,00	333,44%	145,13%		



						N PEMERINTAH DESA																		
	7. 01	5 6	0 6	2 . 0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pem- inaan dan Pengawa- san Pemerintahan Desa	23 Desa	75.461.000,00	23 Desa	109.513.500,00	23 Desa	76.772.400,00	23 Desa	-	10 0,0 0 %	0,00%	23	109.513.500,00	100,0 0%	145,13 %			
	7. 01	5 6	0 6	2 . 0 1	0 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dok	51.348.000,00	23 Dok	71.540.000,00	23 Dok	44.081.400,00	23 Dok	-	10 0,0 0 %	0,00%	23	71.540.000,00	100,0 0%	139,32 %			
	7. 01	5 6	0 6	2 . 0 1	0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23 Dok	24.113.000,00	23 Dok	37.973.500,00	23 Dok	32.691.000,00	23 Dok	-	10 0,0 0 %	0,00%	23	37.973.500,00	100,0 0%	157,48 %			



2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Kedungpring sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kedungpring merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah.

Selanjutnya untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel analisa pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kedungpring berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan

No.	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Kecamatan	84,50	84,55	84,60	84,65	85,18	85,33	84,65	85,40	
			Nilai IKM	86,54	87,04	87,07	88,00	87,09	87,12	87,10	87,30	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa		Jumlah Desa Maju	2	3	3	3	13	13	3	3	
			Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Presentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Presentase Desa Naik Kelas	8,70%	13,04%	13,04%	13,04%	43,48%	34,78%	13,04%	13,04%	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Kedungpring

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan Kedungpring dalam hal kritis adalah untuk meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Kedungpring antara lain:
 - a. Kecamatan Kedungpring kategori Type C maksimal jumlah personil sebanyak 22 orang, sedangkan jumlah personil yang ada sekarang sebanyak 13 orang ditambah 1 orang Tenaga Kontrak sehingga masih kurang, dan dalam melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap pekerjaan lain,
 - b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam tugas-tugas pelayanan belum maksimal disebabkan :
 - Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik kepada masyarakat masih terbatas ;
 - Sarana meubelair di Kantor Kecamatan Kedungpring untuk rapat-rapat pertemuan masih kurang.
 - Kendala jaringan dalam sistem pelayanan kependudukan yang sering error, serta alat cetak KTP yang masih dalam kondisi perbaikan, sehingga menyebabkan pelayanan pencetakan KTP tidak bisa dilakukan di Kecamatan.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kedungpring hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kedungpring sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan



jalan di wilayah Kecamatan Kedungpring terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

- e. Pembinaan secara masif dan berkala bagi organisasi-organisasi kepemudaan di wilayah Kecamatan Kedungpring, seperti organisasi beladiri, karang taruna, dan keagamaan. Hal ini dimaksudkan agar pemuda sebagai generasi penerus bangsa dapat memaksimalkan potensi dan gagasan kreatifitasnya. Sehingga dapat turut membangun daerah dan meminimalisir konflik yang timbul karena gesekan antar organisasi kepemudaan.
 - f. Pengelolaan pengadministrasian pemerintahan desa yang belum maksimal, baik secara sumber daya manusia maupun administratif. Dimana Pemerintah Daerah Kecamatan Kedungpring mengadakan rapat koordinasi untuk setiap bagian perangkat desa, seperti sekretaris desa, bendahara desa, dan bagian-bagian yang lain secara bergantian pada setiap minggunya. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan perbaikan administratif desa sehingga APBD dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Kedungpring terhadap Capaian program Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Pemerintahan. Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan Umum dan Ketertiban Masyarakat.
- a. **Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.**
 - Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Kedungpring setiap bulan.
 - Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan Kedungpring setiap bulan.



- Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan Kedungpring setiap bulan.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat.

- Melakukan Monitoring pendistribusian Raskin.
- Mengkoordinir penjangkaran data Jamkesda dan Jamkesmas.
- Pelayanan Surat Permohonan Bantuan Sarana Sosial.
- Pelayanan Surat Pernyataan Miskin.
- Pelayanan Pendistribusian Dana PSKS, PKH dan Penyaluran bantuan Pendidikan GNOTA kepada para Siswa-Siswi tidak mampu yang berprestasi.

c. Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian dan Pembangunan

- Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur, Jembatan dan Jalan Poros Desa, Pembangunan RT, Balai Desa.
- Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan serta pelaporan.

d. Meningkatnya pelayanan publik secara prima kepada masyarakat

- Terwujudnya peningkatan pelayanan Publik kepada masyarakat secara prima.

e. Meningkatnya pelayanan Tertib administrasi, kedisiplinan dan pengetahuan

- Terwujudnya tertib administrasi berupa capaian indikator jumlah surat masuk dan keluar jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian setiap bulan, triwulan dan semester serta penyelenggaraan dan penyetaraan sistem kelembagaan.
- Terwujudnya pembinaan aparatur pemerintah, rapat Staf setiap bulan, melaksanakan SKJ setiap hari Jum'at dan Apel



pagi/sore setiap hari kerja serta penyempurnaan struktur jabatan dan analisa beban kerja.

- Mengikutsertakan Diklat PIM bagi Staf yang menduduki jabatan serta Pengembangan pengawasan SJPD berbasis kinerja.

f. Meningkatnya Pengendalian keamanan dan ketentraman masyarakat di wilayah Kecamatan Kedungpring.

- Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah kepada masyarakat ;
- Terwujudnya penanggulangan dan penanganan Bencana Alam di wilayah Kecamatan Kedungpring.
- Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Terwujudnya Pengendalian terhadap pengusaha industri yang belum memiliki ijin usaha, miras dan narkoba.
- Terwujudnya pelaksanaan Pembinaan dan penertiban terhadap para pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara, penertiban terhadap warung liar dan pemberantasan miras.

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD Kecamatan Kedungpring;
5. Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:
 - a. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - c. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes.
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat di Kecamatan Kedungpring dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.3
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
	NIHIL				



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional

: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2. Prioritas Provinsi

: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Jawa Timur
- Arah Kebijakan

:

a. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sekolah, dan keterhubungan wilayah

b. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan

c. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosisal yang menghargai prinsip kebhinekaan

d. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.
3. Prioritas Kabupaten

: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Arah Kebijakan

:

a. Meningkatkan kemandirian ekonomi

b. Meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing



- c. Meningkatkan infrastruktur yang handal
- d. Meningkatkan harmonisasi dan kesejahteraan sosial
- e. Mewujudkan pemerintahan yang dinamis

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kedungpring.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kedungpring adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan**

Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif

Sasaran

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah
- 2. Tujuan**

Meninglaya Kemandirian Desa

Sasaran

Meningkatnya Pemberdayaan Desa

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM KEGIATAN
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya Kemandirian	Prosentasi Peningkatan	Meningkatnya Pemberdayaan	Jumlah Desa Maju	1. Program Pemberdayaan



Desa	Jumlah Desa Mandiri	Desa		Masyarakat Desa dan Kelurahan
				2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Kerja OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025 ini dijadikan sebagai Pedoman Kegiatan OPD Kecamatan Kedungpring dalam menentukan arah yang dicapai pada Tahun 2025, dan sebagai bahan evaluasi kerja untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dijabarkan melalui Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

- 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
 - a. Program dan kegiatan rutin setiap tahun.
 - b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
 - c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa se Kecamatan Kedungpring.



d. Pencapaian SDG's

SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. merupakan role pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa .



Gambar 3.1 18 Tujuan SDGs Desa

18 Tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan



8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

2. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan adalah :

1) Program : **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**, dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program : **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**, dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



3) Program : **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan uraian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4) **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6) **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

a) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

3. Penjelasan rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perubahan RKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif adalah: tetap dilaksanakan sesuai dengan Realisasi anggaran yang tercantum di DPA.



TABEL 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

NO	RKPD TAHUN 2025				PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				SELISIH (Bertambah/ Berkurang)	ALASAN PERUBAH AN	PD PENANGGUN G JAWAB
	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGE T DAN SATUA N	PAGU PROGRAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84,65%	Rp2.307.632.452	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	84,65%	Rp 2.146.528.545	Rp 161.103.907	EFISIENSI (Pergeseran Anggaran)	KEC. KEDUNGPRI NG
	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	9 Dok	Rp 74.614.400	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	9 Dok	Rp 74.614.400	Rp -		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras	5 Dok	Rp 14.206.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras	5 Dok	Rp 14.206.400	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dok	Rp 17.959.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dok	Rp 17.959.000	Rp -		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	Rp 42.449.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	Rp 42.449.000	Rp -		



	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	12 Lap	Rp1.840.008.100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun tepat waktu	12 Lap	Rp 1.748.729.893	Rp 91.278.207		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Peg	Rp 1.824.249.300	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Peg	Rp 1.732.971.093	Rp 91.278.207		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 Lap	Rp 8.129.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 Lap	Rp 8.129.400	Rp -		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD dan RENJA SKPD	4 Dok	Rp 7.629.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan LKPJ, LKjIP, LPPD dan RENJA SKPD	4 Dok	Rp 7.629.400	Rp -		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian dengan baik	100%	Rp 15.729.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan Kepegawaian dengan baik	100%	Rp -	Rp 15.729.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25 Stel	Rp 15.729.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	25 Stel	Rp -	Rp 15.729.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja tugas umum pemerintah	100%	Rp 63.979.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja tugas umum pemerintah	100%	Rp 51.330.400	Rp 12.648.700		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor	8 Jenis	Rp 8.616.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan komponen instalansi listrik/Penerangan bangunan kantor	8 Jenis	Rp 5.026.000	Rp 3.590.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	Rp 15.398.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	Rp 11.304.000	Rp 4.094.400		



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	25 Item	Rp 23.769.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	25 Item	Rp 18.805.400	Rp 4.964.300		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dok	Rp 5.556.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dok	Rp 5.556.000	Rp -		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan untuk makanan dan minuman rapat	4 keg	Rp 10.639.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan untuk makanan dan minuman rapat	4 keg	Rp 10.639.000	Rp -		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan	100%	Rp 25.110.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasara yang dibutuhkan	100%	Rp 20.862.800	Rp 4.248.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	2 Item	Rp 25.110.800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan gedung kantor	2 Item	Rp 20.862.800	Rp 4.248.000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	Rp 204.669.452	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia dengan Baik	100%	Rp 167.469.452	Rp 37.200.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	3 Rek	Rp 45.797.452	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	3 Rek	Rp 45.797.452	Rp -		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	9 Org	Rp 158.872.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga jasa kebersihan kantor	9 Org	Rp 121.672.000	Rp 37.200.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	Rp 83.521.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	Rp 83.521.600	Rp -		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan surat	1 Unit R4 & 9 Unit R2	Rp 23.812.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit R4 & 9 Unit R2	Rp 23.812.000	Rp -		



		yang terbayarkan				dan surat yang terbayarkan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Item	Rp 13.520.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Item	Rp 13.520.000	Rp -		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan	1 Paket	Rp 46.189.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan yang dilakukan	1 Paket	Rp 46.189.600	Rp -		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	100%	Rp 10.783.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tepat waktu	100%	Rp 10.783.500	Rp -		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp 10.783.500	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	100%	Rp 10.783.500	Rp -		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 10.783.500	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 10.783.500	Rp -		
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	Rp 82.445.800	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	Rp 34.373.500	Rp 48.072.300		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	23 Desa	Rp 51.630.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	23 Desa	Rp 13.718.300	Rp 37.912.100		



	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 30.871.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 3.338.800	Rp 27.532.600		
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Desa	Rp 20.759.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23 Desa	Rp 10.379.500	Rp 10.379.500		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	23 Desa	Rp 30.815.400	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	23 Desa	Rp 20.655.200	Rp 10.160.200		
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	23 Keluarga	Rp 30.815.400	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	23 Keluarga	Rp 20.655.200	Rp 10.160.200		
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	Rp 15.802.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	100%	Rp 15.802.800	Rp -		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang dibina keamanan dan ketertiban umum	23 Desa	Rp 15.802.800	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yang dibina keamanan dan ketertiban umum	23 Desa	Rp 15.802.800	Rp -		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Desa	Rp 15.802.800	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Desa	Rp 15.802.800	Rp -		



5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Rp 28.038.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100%	Rp 22.978.800	Rp 5.060.000		
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi urusan Pemerintahan umum	100%	Rp 28.038.800	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi urusan Pemerintahan umum	100%	Rp 22.978.800	Rp 5.060.000		
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23 Desa	Rp 28.038.800	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23 Desa	Rp 22.978.800	Rp 5.060.000		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	13,04%	Rp 84.812.400	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	13,04%	Rp 76.772.400	Rp 8.040.000		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Desa	Rp 84.812.400	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Desa	Rp 76.772.400	Rp 8.040.000		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dok	Rp 52.121.400	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dok	Rp 44.081.400	Rp 8.040.000		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23 Dok	Rp 32.691.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23 Dok	Rp 32.691.000	Rp -		
	TOTAL			Rp 2.529.515.752	TOTAL			Rp 2.307.239.545	Rp 222.276.207		



BAB IV
P E N U T U P

4.1 Catatan Penting

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Kedungpring sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kedungpring merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan Strategis Pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan Rencana kerja OPD Kecamatan Kedungpring dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Kedungpring pada tahun mendatang akan menetapkan 6 program yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Kedungpring tahun 2025



merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 (satu) Tahun.

Demikian Penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2025, diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja OPD Kecamatan Kedungpring tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Kedungpring, 17 Juni 2025
CAMAT KEDUNGPRING
KABUPATEN LAMONGAN



NOMAN KRESNA MARTHA SENA, S.STP.,M.Si
Pembina
NIP. 19840301 200212 1 001

